

PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2002-2013

(The Development of Tourism Sector in Banyuwangi Regency 2002-2013)

Hisyam Arifal Fahad, Eko Crys Endrayadi
Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ekocrys@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the development of tourism sector in Banyuwangi regency 2002-2013. The problems in this thesis are (1) the conditions of tourism before the government issues policies; (2) the regional government's efforts to develop tourism sector; (3) the impact of tourism towards economic, social, and cultural life in Banyuwangi regency. To discuss the problems, this study applies theory of modernization by using the sociology of tourism approach and historical method. Tourism is not merely an activity to find pleasure, but also the source of foreign exchange. One of regencies which can develop tourism industry is Banyuwangi. The development of tourism in this regency, in its early development, experienced fluctuation that was caused by the economic crisis and the tragedy of santet (the killings of many people who were issued having black magic in 1998-1999) that decreased Banyuwangi's tourism image. Such condition still run until the issue of the 2102 regional government's regulation as the legal standing of tourism development in Banyuwangi. This regulation has got positive response from the investors that has been showed by the construction of hotel industry, tourism destinations, and transportation which have made Banyuwangi as the centre of emergent economic department in East Java. The growth of tourism has brought new jobs for the society as the managers of tourism services and regrowing local cultures through carnival events conducted by the regional government and society.

Keywords: *Industry, Tourism, Banyuwangi*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan rangkaian perjalanan seseorang atau kelompok dalam mengunjungi suatu tempat ke tempat lain, tetapi tidak untuk menetap melainkan akan kembali ke tempat asal dengan tujuan untuk mencari kepuasan (Budisantoso, 1980: 11-19). Kegiatan pariwisata berkembang luas hingga melibatkan ratusan juta manusia, baik di kalangan pemerintah dan masyarakat dengan biaya yang cukup tinggi dalam ber-pariwisata (Hari Karyono, 1997: 45-51). Perkembangan tersebut menjadikan sektor pariwisata mengalami perubahan pola, bentuk, dan sifat kegiatan yang dapat menguntungkan pihak pengelola wisata dan pendapatan daerah. (James Spillane, 1987: 37). Fluktuatif perkembangan sektor pariwisata justru terjadi di Indonesia hal ini karena adanya pengaruh politik yang dinilai kurang maksimal dalam mengelola aset wisatanya. Bahkan pada masa Orde Baru pemerintahan otoriter membuat setiap kebijakan diputuskan hanya pada pemerintah pusat. (Hanif Nurcholis, 2005: 33). Seiring pergantian tatanan birokrasi dari masa Orde Baru menjadi Pemerintahan Reformasi mengakibatkan banyaknya perbaikan dan revisi terjadi pada undang-undang. Di tandai dengan adanya pemberlakuan Otoda tahun 1999

memberikan motivasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah turut berpartisipasi dalam rangka pembangunan nasional. Adanya Otoda, maka suatu pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Guna mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dipandang sebagai menjadi sektor yang menjanjikan untuk dikembangkan. Faktanya bahwa adanya pariwisata dapat menyumbang hingga 10% dari produk domestik bruto global, sehingga pariwisata menjadi industri terbesar di dunia (James Spillane, 1987: 43-44). Besarnya pengaruh industri sektor pariwisata dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat dalam bentuk usaha, bahkan negara dapat memperoleh pendapatan melalui devisa negara.

Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu bagian dari kabupaten yang turut berpartisipasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal melalui industri pariwisata. Kabupaten Banyuwangi memiliki daya tarik di sektor pariwisata yang sangat beragam. Terdapat pemandangan alam seperti pantai, gunung, hutan, taman nasional, budaya, dan lainnya. Berdasarkan keragaman aset pariwisata yang lebih dominan pada di kabupaten Banyuwangi yakni wisata alam, maka pembangunan pariwisata yang diutamakan

adalah *eco-tourism*, dengan kata lain pengembangan sektor pariwisataberwawasan lingkungan dan budaya (Wawancara Dariharto, 8 Januari 2016). Keberadaan akan potensi SDA dan keanekaragaman budaya yang dimiliki Banyuwangi dapat membuat pembangunan pariwisata menjadi lebih mudah.

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni (1) Bagaimana kondisi pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya kebijakan pemerintah? (2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkan sektor pariwisata? (3) Serta apa dampak pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di Kabupaten Banyuwangi?.

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui Potensi sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi sebelum ada kebijakan dari pemerintah, lalu menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam mengelola pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, maka dalam hal ini dapat diketahui nantinya dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan pariwisata terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Adapun metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan penulisan yaitu heuristik, kritik sumber (intern dan ekstern), interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1983: 32).

Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi sebagian besar kondisi ekonominya bergerak di bidang pertanian, hal ini dikarenakan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas mencapai 5,782,50 km² dimanfaatkan sebagai areal persawahan seluas 66.487,00 ha, sehingga sektor tersebut mempunyai pengaruh penting terhadap tingkat perekonomian masyarakat sebesar 49.18 persen. Sektor ekonomi kedua yang memiliki peranan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan terhadap perekonomian Kabupaten Banyuwangi sebesar 24,05 persen atau sepertiga dari kegiatan ekonomi yang ada di Kabupaten Banyuwangi bergerak di sektor perdagangan, hotel dan restoran. (Badan Pusat Statistik, 2002 : 15). Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi perdagangan dan hotel tidak lepas dari posisi strategis Kabupaten Banyuwangi yang berdekatan dengan Pulau Bali, kekayaan budaya dan pariwisata di Banyuwangi. Berbagai jenis lokasi wisata yang ada di Banyuwangi seperti wisata bahari, wana wisata dan wisata buatan oleh karena secara topografi Kabupaten Banyuwangi berada di Bawah Pegunungan Merapi dan diapit oleh

Selat Bali dan Samudera Hindia (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013: 21).

Dari suku/etnis berbagai macam terdapat di Kabupaten Banyuwangi seperti Suku Madura, Suku Using, Suku Bali, Suku Mandar, Etnis Tionghoa dan sebagainya. Selain itu terdapat 35 macam kesenian di Kabupaten Banyuwangi yang turut diapresiasi, kesenian tersebut tidak hanya kesenian asli Banyuwangi melainkan juga kesenian hasil akulturasi dengan budaya luar. Kesenian-kesenian tersebut antara lain: *Gandrung, Angklung, Kuntulan, Hadrah, Gedogan, Patrol, Barong, Janger, Jaranan, Mocoan, Campursari Jowoan, Wayang Kulit, ludruk, Kendang Kempul, dan Gambus*. (Dariharto, 2009: 9). Beberapa kesenian tersebut, kesenian yang paling populer di Banyuwangi adalah kesenian *gandrung* dan *angklung*. Orang Using tidak hanya tinggi daya apresiasinya, akan tetapi orang Using juga memiliki daya kreatifitas yang tinggi dalam berkesenian. Berbicara tentang kesenian, maka tidak akan lepas dengan kesenian *Gandrung* sebagai seni tradisional, sebagai seni hiburan ataupun sebagai bentuk identitas budaya Using sangat besar pengaruhnya dalam dunia seni Banyuwangi. Baik dalam bentuk tariannya, lagu-lagunya atau ornamen-ornamennya sangat mudah ditemui di Banyuwangi (Dariharto, 2009: 15).

Keanekaragaman potensi alam, kekayaan seni, budaya, dan adat tradisi Banyuwangi merupakan sebuah mahkota yang harus dipelihara dan ditunjukkan kepada dunia luar. Dengan begitu, potensi tersebut dapat bermanfaat, baik untuk masyarakat maupun pemerintah, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kekayaan tersebut akan menjadi point penting dalam pembangunan, terutama di sektor pariwisata, yang harus diangkat ke kancah nasional maupun internasional.

Kondisi Obyek-Obyek Wisata Kabupaten Banyuwangi Sebelum Tahun 2002

Kondisi pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan hasil fluktuatif dikarenakan oleh beberapa hambatan yang dilalui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hambatan tersebut dimulai dari adanya krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia dan peristiwa tragedi santet tahun 1998. Semua hambatan tersebut menimbulkan dampak buruk bagi pariwisata Indonesia, sehingga menimbulkan *travel warning* dari negara-negara asing bagi warga negaranya untuk melakukan kunjungan ke Indonesia, termasuk ke Kabupaten Banyuwangi (Dinas Pariwisata Daerah, 1994: 38). Peristiwa yang paling berdampak bagi citra kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi yaitu peristiwa tragedi santet pada tahun 1998. Peristiwa tersebut, membuat Kabupaten

Banyuwangi mendapatkan citra negatif di mata masyarakat khususnya wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi.

Kedatangan wisatawan ke suatu negara atau daerah tentu tidak lepas dari aspek citra negara itu sendiri, bahkan keamanan sangat penting untuk menjamin arus kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi. Arus kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata wilayah pengembangan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi mengalami fluktuasi (Badan Pusat Statistik, 2002: 14).

Fluktuasi tingkat kunjungan wisatawan disebabkan oleh keadaan perekonomian masyarakat/wisatawan lokal tahun 1998-2000. Perekonomian masyarakat di Kabupaten Banyuwangi masih belum stabil akibat krisis moneter. Segala perhatian dan pendapatan yang diperoleh masyarakat masih difokuskan pada kebutuhan pokok Sementara itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih relatif stabil di empat obyek wisata Kabupaten Banyuwangi yaitu Taman Nasional Alas Purwo, Kawah Ijen, Taman Nasional Meru Betiri dan Taman Nasional Baluran. Adanya obyek wisata alternatif menjadi hiburan bagi masyarakat lokal pada periode tahun tersebut dikarenakan oleh akses lebih mudah serta biaya perjalanan murah seperti Pantai Watudodol, Desa Using (diresmikan tahun 1996), Taman Suruh (diresmikan tahun 1999), dan wisata Grajagan. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013: 33). Dari 17 obyek wisata daerah pengembangan Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Banyuwangi, terdapat 4 obyek wisata mengalami penurunan jumlah wisatawan akibat dari kurangnya kesadaran dari masyarakat dan pengelola obyek wisata untuk menjaga obyek wisata tersebut sebagai daerah tujuan wisata. salah satu contohnya obyek wisata Pantai Boom menjadi obyek wisata mengalami tingkat kunjungan rendah dibandingkan Tamansuruh. Hal ini dikarenakan oleh kebersihan di pantai Boom masih kurang terjamin, meskipun lokasinya berada di tengah Kota Banyuwangi (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013: 37-38).

Kondisi Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2013

Kebijakan Pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pasca lengsernya Pemerintahan Orde Baru, dengan ditandai pembentukan Undang-Undang Otda memberikan Kebebasan bagi setiap wilayah dalam mengelola potensi daerahnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Kebijakan Otda merupakan suatu motivasi bagi setiap pemerintah maupun kelompok masyarakat yang diberikan hak kebebasan

untuk mengelola, mengatur, dan mengamati setiap pembangunan, terutama dalam memanfaatkan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang dimiliki. Pengembangan sektor pariwisata merupakan langkah cukup realistis, mengingat bahwa manfaat yang diberikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian integral pembangunan nasional, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar di sektor pariwisata, baik dalam hal potensi alam memiliki keanekaragaman juga kekayaan budaya, sehingga bila kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan optimal, maka bukan hal yang tidak mungkin di waktu yang akan datang Kabupaten Banyuwangi akan mampu menjadi daerah tujuan wisata pada saatnya mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam rangka menciptakan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata maka diperlukan penataan, strategi yang tepat dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab antara pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta masyarakat sebagai pelaku utama usaha jasa yang berhubungan langsung dengan wisatawan.

Sejak tahun 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mulai membentuk, mengelola dan mengatur sektor pariwisata seperti diterbitkannya PERDA Nomor 40 Tahun 2002, tentang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memajukan sektor pariwisata dengan tetap menjaga kelestarian alam dan budaya. PERDA tersebut digunakan sebagai landasan hukum bagi setiap pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2015: 4). Melalui peraturan tersebut, Bupati Samsul Hadi tahun 2002 menanggapi dengan mempromosikan Banyuwangi ke tingkat nasional. Dimulai dengan membangun Patung Gandrung di Kawasan Obyek Wisata Watu Dodol sebagai pintu masuk utama Kabupaten Banyuwangi. Penetapan Gandrung tersebut digunakan sebagai maskot pariwisata yang dirancang melalui SK Bupati Banyuwangi Nomor. 173 Tanggal 31 Desember 2002 (Wawancara Dariharto, 8 Januari 2016).

Guna mempermudah akses wisatawan yang berkunjung, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membangun trayek jalur penerbangan bandara di Desa Blimbingsari. Bandara Blimbingsari ditetapkan sebagai bandar udara oleh menteri perhubungan dan dilakukan sejak tahun 2004, sekaligus merupakan sebuah proyek *multiyears* atau menitik-beratkan pada pembangunan fisik secara periodik untuk mewujudkan harapan masyarakat Banyuwangi akan tersedianya jalur transportasi udara. Namun proyek lapangan terbang Blimbingsari mengalami hambatan dalam

proses pembangunannya akibat dari kasus korupsi pembebasan lahan yang merugikan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2005 (Anonim, 2012: 7). Era Kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari pada tahun 2005 menggantikan bupati sebelumnya (Samsul Hadi). Prospek kebijakannya dilakukan mulai dari pembangunan infrastruktur yang mendukung pola peningkatan kegiatan sosial, budaya dengan pemulihan infrastruktur masyarakat perdesaan dan pemantapan prasarana sosial dasar lingkungan. Bupati Ratna Ani Lestari juga mengupayakan kebijakan di sektor pariwisata yang di bentuk melalui pembenahan di bidang jasa transportasi. Dalam kebijakan tersebut, Bupati Ratna Ani Lestari melanjutkan proyek pembangunan Bandar Udara Blimbingsari yang sempat tertunda di tahun 2005. Namun, lanjutan dari pembangunan proyek Bandar Udara Blimbingsari tidak berjalan sesuai target perencanaan yang diproyeksikan oleh menteri perhubungan akan selesai di tahun 2008. Pembangunan Bandara Blimbingsari terkesan berjalan lambat yang diakibatkan oleh kasus serupa yaitu upaya pembebasan lahan pada periode tahun 2008-2009 (Anonim, 2012: 7).

Pada tahun 2010 Bupati Ratna Ani Lestari secara resmi digantikan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas. Kebijakan dalam mengembangkan sektor pariwisata di bawah pimpinan Bupati Anas dilakukan melalui RPJMD tahun 2010. Visi dan misi Kabupaten Banyuwangi dalam RPJMD tahun 2010, diketahui bahwa pengembangan pariwisata pada masa pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas dilakukan secara terintegrasi *stakeholder*. Tujuannya agar diharapkan setiap keputusan dilakukan dengan saling terhubung, saling memberi dampak positif dan berjalan beriringan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai melakukan beberapa langkah kebijakan utama dalam menunjang sektor pariwisata tertuang pada misi ke III, yaitu: *Pertama*, perbaikan infrastruktur untuk akses ke tujuan wisata unggulan Kawah Ijen, Sukamade dan Plengkung. *Kedua*, promosi kekayaan budaya lokal, hal ini karena Kabupaten Banyuwangi memiliki kebudayaan lokal dan potensi wisata alam yang sangat beragam agar supaya dikemas semenarik mungkin untuk tujuan para wisatawan. *Ketiga*, Kombinasi modernitas dan lokalitas, serta konsolidasi komunitas pariwisata, termasuk mempersiapkan pola perilaku masyarakat dalam menjaga komunikasi yang baik kepada wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Dalam hal ini, maksudnya masyarakat Banyuwangi dibiasakan untuk bersikap ramah kepada wisatawan. *Stakeholder* pariwisata di Banyuwangi harus kompak untuk tumbuh dan memberikan efek *multiplier* luas

bagi kesejahteraan masyarakat, karena sektor pariwisata memiliki sektor cabang yang bisa meningkatkan perekonomian lokal (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2013: 26-27).

Kondisi Obyek-Obyek Wisata di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2002-2013

Sejak diterbitkan PERDA Kabupaten Banyuwangi tahun 2002 tentang Usaha Kepariwisata Kabupaten Banyuwangi, sistem pengelolaan obyek-obyek wisata mulai bebas dilakukan oleh setiap pemerintah daerah bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam inovasi-inovasi kreatif yang telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Banyuwangi terkait usaha pengelolaan obyek wisata tersebut. Beberapa obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan responsif terkait pengelolaan atau pembenahan obyek wisata secara terarah. Pengembangan wisata alam di Kabupaten Banyuwangi pariwisata seperti, Obyek Wisata Pantai Watudodol pada tahun 2002 menjadi awal dari gagasan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang dipimpin oleh Bupati Samsul Hadi dengan brand *Jenggirat Tangi*, sekaligus dijadikannya sebagai pintu masuk Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dan dibangun sebuah patung Gandrung sebagai maskot pariwisata. Pengembangan obyek wisata di Kabupaten Banyuwangi turut diikuti dengan obyek wisata Kawah Ijen yang dilakukan dengan membenahi Desa Tamansari sebagai jalan utama telah beraspal dan jembatan desa yang terbuat dari beton ada 6 buah yang mana fungsinya untuk memperlancar kegiatan masyarakat yang selesai dilakukan pada akhir tahun 2010 melalui APBD Kabupaten sebesar 6 miliar rupiah. Kawasan Taman Nasional Meru Betiri atau Sukamade yang juga sebagai salah satu objek wisata unggulan di Kabupaten Banyuwangi mulai disediakan pondok wisata, *camping ground*, pendopo, *shelter*, *souvenir shop*, *information centre*, dan perbaikan laboratorium (tempat penangkaran penyu). Selain itu pada obyek wisata pantai Plengkung dan pantai boom mulai dipasang papan penunjuk arah atau *sign* digunakan sebagai mempermudah para wisatawan. Segala upaya pemerintah daerah dalam membenahi fasilitas pendukung obyek wisata alam di Kabupaten Banyuwangi, disertai pula dengan dibukanya obyek wisata Bedul Mangrove dan Pulau Merah sebagai lokasi wisata baru di Kabupaten Banyuwangi. Berbagai *event sport tourism* dilakukan untuk mendukung kesuksesan promosi wisata di Banyuwangi seperti: kejuaraan *international surfing*

(obyek wisata Plengkung dan Pulau Merah) yang dihadiri oleh wisatawan mancanegara tahun 2012 dan Kawah Ijen sebagai tempat dilaksanakannya event *Tour De Ijen* Tahun 2013 (Bayu Mitra, 2014: 120).

Berkembangnya industri pariwisata modern terutama setelah adanya Perda di Kabupaten Banyuwangi turut memberikan ladang usaha bagi pihak-pihak swasta dalam mendirikan jasa obyek wisata baru terutama wisata buatan di Kabupaten Banyuwangi. Wisata buatan ini hadir dalam rangka melengkapi wahana wisata lain yang telah berdiri di Kabupaten. Taman rekreasi Alam Indah Lestari (AIL) berada di Kecamatan Rogojampi mulai didirikan pada tahun 2003 di bawah naungan perusahaan swasta milik Michael. selain itu diikuti dengan berdirinya Obyek wisata Umbul Pule tahun 2004 oleh Ali Muhtar Bahaki selaku pengusaha dari CV. Insan Sejati. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2013: 23-27) Berbicara mengenai wisata buatan di Kabupaten Banyuwangi turut berdampak juga pada pengembangan taman kota sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau). Strategi pengembangan taman kota tersebut dijabarkan tahun 2011. Pemkab Kabupaten Banyuwangi mengawalinya dengan menyulap Taman Blambangan atau Taman Sritanjung hingga Taman Makam Pahlawan dengan penambahan fasilitas, seperti: batu refleksi, area PKL, *free wifi*, air mancur, labirin, lampu taman dan toilet. Hasilnya pun cukup bagus, Taman Makam Pahlawan hasil dari renovasi Pemkab dinobatkan sebagai *pilot project* dari Kementerian Sosial RI pada tahun 2012. Sebagian pemerintah daerah mulai melirik TMP Banyuwangi beserta Taman Blambangan tahun 2013 dibuat sebagai bagian dari acara studi banding. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2015:12).

Perkembangan obyek wisata budaya di Kabupaten Banyuwangi meliputi obyek-obyek wisata menampilkan kesenian adat daerah serta budaya menawarkan lokalitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Hal itu diisi dengan adanya program kesenian hiburan yang sejak tahun 2002 dilakukan. Program kesenian "Umbul-Umbul" dilakukan sebagai bentuk promosi wisata yang di lokasikan di kawasan Pantai Boom Kabupaten Banyuwangi sebagai prioritas kebijakan Samsul Hadi dengan memberikan ruang bagi kesenian Gandrung sebagai bentuk industri hiburan modern, memiliki tujuan terutama untuk membangkitkan citra dari kesenian Gandrung sendiri sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Program-program wisata budaya turut dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Abdullah Azwar Anas bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010 melalui sebuah event-event yang digelar setiap satu tahun sekali. Hal tersebut bertujuan untuk menambah program obyek

wisata sekaligus melestarikan budaya daerah setempat. Program-program tersebut meliputi: Festival *Gandrung Sewu* Pantai Boom, Festival *Kuwung* di Kota Banyuwangi, *Seblang* Desa Olehsari-Bakungan, *Barong Ider Bumi*, *Banyuwangi Ethno Carnival* (BEC), dan sebagainya (Bayu Mitra, 2014: 120).

Peran Swasta dan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi

Program peningkatan daya tarik investor bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan nilai investasi secara signifikan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Pemkab Banyuwangi melalui industri pariwisata yaitu membaiknya iklim investasi yang didukung oleh sistem pelayanan investasi yang efisien dan efektif. Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah memiliki potensi alam yang cukup besar mulai menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur, hal ini dilihat dari banyaknya pengusaha atau investor yang mulai melirik Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Jawa tersebut. peran para investor mulai terlihat dari beberapa industri besar telah dibangun di Banyuwangi seperti PT Semen Gresik Tbk dan PT Semen Boswa, bahkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan lahan seluas 600 hektar untuk pembangunan dua kawasan industri tersebut. Kementrian BUMN juga melirik Banyuwangi sebagai kawasan industri modern, Mereka berupaya untuk membangun pabrik gula terbesar se-Indonesia dengan kapasitas giling 10.000 ton tebu/hari yang berencana dilaksanakan pada 12 Desember 2012 (Bappeda, 2013: 40-45). Selain BUMN, Pemkab Banyuwangi juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa investor swasta lainnya. Adapun para investor tersebut di antaranya PT. Sumber Yala Samudra, PT. Avilla Prima Intra Makmur, PT.Maya Muncar, CV. Pacivic Harvest, Pabrik Kertas Basuki Rahmat (Bappeda, 2013: 58). Dari 5 badan swasta yang dibangun di Kabupaten Banyuwangi memiliki nilai investasi cukup besar dari 1 milyar hingga 10 milyar Rupiah. Guna menarik investor, jalur transportasi udara di Kabupaten Banyuwangi turut dibenahi. Beroperasinya Bandara Blimbingsari pada tahun 2011 telah melayani rute perjalanan Banyuwangi-Surabaya yakni Merpati Airlines dan Wings Air (Bappeda, 2013: 79-80). Mudah akses transportasi menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan investasinya, sehingga beroperasinya Bandara Blimbingsari membuka pintu investasi yang cukup besar di Kabupaten Banyuwangi.

Peran masyarakat juga dibutuhkan guna membantu perkembangan perekonomian Banyuwangi, khususnya pada bidang pariwisata. Bentuk partisipasi masyarakat di antaranya dengan membangun *home industri* (Bayu

Mitra, 2014: 36). Keberadaan *home industri* ini dapat menciptakan berbagai suatu usaha-usaha di bidang kerajinan hingga produk makanan olahan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Industri Kerajinan menjadi suatu usaha yang dilakukan di hampir seluruh pedesaan Banyuwangi. Berbagai jenis bahan alami diolah dengan kreatifitas masyarakat dalam sebuah kelompok pemberdayaan masyarakat, sehingga menjadi bentuk berupa hiasan, makanan maupun perabotan sehari-hari. Hasil kreativitas dari masyarakat menjadi perhatian di berbagai negara, seperti Jerman, Australia, Jepang, Amerika dan Swiss. Produk-produk tersebut, diolah lalu dijual ke beberapa pasar induk di kawasan pusat-pusat kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, kemudian dikemas menjadi sebuah cinderamata yang dikhususkan menjadi oleh-oleh wisatawan. Sebuah produk-produk kreatif hasil UMKM tersedia sebagai produk unggulan masyarakat, seperti kerajinan batok kelapa, kerajinan tangan, souvenir penari gandrung, serat apaka, jaket kulit, aneka minuman buah, keripik. Tidak ketinggalan batik khas Banyuwangi, motif khasnya adalah gajah uling, kangkus setingkes, paras gempal, dan geringsing. Terdapat pula produk unggulan pangan tersedia, antara lain kue bangkiak, sale pisang, marning, krupuk cumi, manisan cereme dan lainnya. Untuk olahan produk kerajinan tangan tersedia anyaman Bambu di daerah Rogojampi dan Gintangan, anyaman bambu ini telah menjadi *icon* produk kreatif Banyuwangi (Christian Andika, 2012: 25-26).

Dampak Ekonomi

Peranan sektor pariwisata di bidang jasa menempati urutan kedua sebagai penunjang perekonomian Kabupaten Banyuwangi. Meski berada di posisi kedua dalam struktur PRDB, namun keberadaan sektor ini telah menjadi lokomotif utama dalam mengangkat tumbuhnya perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang semakin tahun mengalami kenaikan harga barang dan jasa. Sektor perdagangan, hotel, dan jasa pada tahun 2010 mampu tumbuh sebesar 26,81% dan pada tahun 2011 mencapai hingga 30,2%. Peningkatan di bidang industri pariwisata didukung dengan besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh Pemkab Banyuwangi setiap tahun. Kenaikan PAD Kabupaten Banyuwangi terlihat signifikan memasuki awal tahun 2010, jumlah sumbangan sektor perhotelan pada tahun-tahun tersebut sebesar 7,24 persen atau mencapai Rp.1.250.000.000,- (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2013: 45-51). Peningkatan tersebut tak lepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 538.913 wisatawan. Beberapa hotel berbintang pun mulai dibuka dan di perbaiki, seperti Hotel Santika, Hotel Surya Plengkung, Hotel *Watudodol Beach*, dan beberapa hotel lainnya. (Wawancara Ainur Rofiq: 10 Februari 2016) Kondisi ini menggambarkan

terbangunnya kepercayaan dan minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuwangi. Perekonomian Kabupaten Banyuwangi semakin tumbuh pesat dengan mulai beroperasinya Bandara Blimbingsari. Apalagi maskapai *Lion Air* dan *Garuda Airlines* sudah melakukan uji coba dan sudah bersiap mengambil rute penerbangan Surabaya - Banyuwangi dan Banyuwangi - Bali pada akhir tahun 2011 (Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2013: 45-51). Di tahun 2012 terjadi stabilitas dari lonjakan kunjungan wisata, promosi dan berbagai event yang digelar setiap tahun menjadikan Kabupaten yang berjudul *The Sunrise of Java*, pendapatannya di sektor pariwisata semakin meningkat menjadi Rp. 1.805.340.000,-. Peningkatan tersebut kemudian menjadikan kabupaten Banyuwangi mampu meraih penghargaan di bidang industri pariwisata, *Travel Tourism Club Award* (TCTA) 2012, sebagai kabupaten/kota yang terus berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkualitas, sehingga memenangkan kategori *Most Improved* sebagai kabupaten/kota yang konsisten mengembangkan sektor pariwisata. Sementara pada tahun 2013, Banyuwangi juga kembali mendapatkan penghargaan dari TCTA untuk kategori *Most Creative* tingkat kabupaten/kota (Christian Andika, 2012: 21).

Dampak Sosial

Adanya pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, banyak masyarakat yang beralih mata pencaharian. Hal itu dikarenakan semakin ramainya kunjungan wisata ke Kabupaten Banyuwangi. Meskipun pertanian masih menjadi mayoritas pekerjaan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi, tetapi pada sektor lain seperti perdagangan dan usaha jasa menjadi pekerjaan sebagian masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya seperti Dikanil, pemilik *homestay* yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan, dan bersama istrinya Nur Rosidah yang sebelumnya bekerja sebagai TKW Taiwan, menginvestasikan rumahnya menjadi sebuah penginapan yang didirikannya sejak tahun 2009 (Wawancara Dikanil, 7 Desember 2015). Dikanil sukses mengelola *homestay* tersebut, ia belajar dari Program Pemberdayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi melalui *Pokdarwis* (Program Sadar Wisata) dan pemilik *homestay* bagaimana cara menata kamar, menyiapkan makanan dan bersikap ramah kepada wisatawan. Hasil dari pendapatan Dikanil mengelola *homestay* berkisar Rp. 100.000,- hingga Rp. 750.000,-. Pendapatan tersebut menjadi lebih besar jika dibandingkan dari pendapatan Dikanil sebelumnya sebagai nelayan lobster yang hanya Rp. 500.000 per/hari, tetapi ia harus menantang gelombang laut dan

resiko nyawa. Perubahan dalam masyarakat menyangkut mobilitas vertikal terlihat pada beralihnya mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor pariwisata, misalkan dulu menjadi buruh tani/nelayan menjadi pemilik usaha vila dan sebagainya (Wawancara Dikanil, 7 Desember 2015).

Dampak Budaya

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka memperluas tujuan dari pengembangan sektor pariwisata daerah, mengadakan acara event tahun dengan memadukan acara dari yang bertaraf lokal hingga bertaraf internasional yang dikemas setiap tahun seperti, Festival Gandrung Sewu, *Banyuwangi Jazz*, Malam Resepsi Hari Jadi Kabupaten Banyuwangi, Pagelaran Wayang Kulit (Dalang Ki Enthus), Festival Kuwung, Tumpeng Sewu Kemiren, Seblang Olehsari, Seblang Bakungan, Barong Ider Bumi, Festival Ngopi Sepuluh, Festival Rujak Soto, *Festival Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*, Banyuwangi Batik Festival (BBF), *Banyuwangi Art Week*, *International Tour de Ijen*, *Banyuwangi Jazz Festival*, *Banyuwangi International Surfing Competition* dan *Banyuwangi International Adventure Trail* (Bayu Mitra, 2013: 128-129). Salah satu event yang paling istimewa adalah *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*. BEC merupakan sebuah karnaval yang sangat unik karena tema yang digunakan budaya lokal kontemporer dengan etnik tradisional. Tujuan utama dari diselenggarakannya BEC yang digelar sejak tahun 2011 adalah untuk menjembatani antara modernitas dengan seni budaya lokal khas Banyuwangi yang dikemas dalam bentuk karnaval bertaraf internasional (Christian Andika, 2013: 7-8). Peserta BEC mengenakan kostum sesuai dengan tema yang selalu berubah setiap tahunnya. Hal ini mampu menstimulus ide dan kreativitas kostum dari masing-masing peserta untuk menunjukkan dan memberikan nuansa warna-warni yang menarik dengan desain yang sangat indah dan megah. BEC tidak hanya bergema secara lokal, tetapi telah terdengar hingga luar daerah di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Kesimpulan

Pariwisata berperan penting bagi pengembangan suatu wilayah. Dengan adanya kegiatan pariwisata maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan berkembang dan maju. Kegiatan pariwisata tersebut dapat dilihat pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu Kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Jawa yang telah berhasil mengembangkan sektor pariwisata dengan

memanfaatkan potensi alam dan keanekaragaman budaya sebagai bagian pokok dari aset penjualan pariwisata. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang sejak awal memiliki tujuan untuk mengangkat kembali citra kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD). Adanya kebijakan tersebut dapat memberikan harapan bahwa pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Banyuwangi dapat dilakukan secara baik dan terarah.

Kesuksesan Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi daerah tujuan wisata sempat mengalami berbagai hambatan. Hambatan tersebut dimulai dari adanya krisis ekonomi yang melanda perekonomian Banyuwangi yang berdampak pada perunutan citra kepariwisataan di mata internasional. Namun hambatan tersebut dapat dilalui oleh Pemkab Kabupaten Banyuwangi pasca lengsernya Pemerintahan Orde Baru, dengan ditandainya pembentukan Otoda tahun 1999 dan Perda tahun 2002 tentang usaha kepariwisataan daerah dan memberikan kebebasan bagi setiap wilayah khususnya Banyuwangi untuk mengelola potensi daerahnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Adanya peraturan tersebut terbukti bahwa kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi mulai mengalami peningkatan dari bidang pembangunan baik dari perbaikan obyek-obyek wisata, Pendapatan Asli Daerah, *event* promosi budaya, hingga fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata lainnya seperti pembangunan hotel, rumah makan, dan fasilitas lainnya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- [1] Budhisantoso. *Pariwisata Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Budaya*. Jakarta: Universitas Press. 1980.
- [2] Dariharto. *Kesenian Gandrung Banyuwangi*, (Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2009).
- [3] Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. *Banyuwangi The New Paradise of Indonesian Tourism: Visitor Guide*. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, 2015.
- [4] Dinas Pariwisata Daerah. *Himpunan PeraturanKepariwisataan*. Jakarta: Departemen Pariwisata Daerah Tingkat 1, 1994.
- [5] Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. (terjemahan Nugroho Notosusanto), Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1983.
- [6] Karyono, Hari. *Kepariwisataan*. Jakarta: PT Grasindo, 1997.

- [7] Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).
- [8] Spillane, James. *Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- [9] Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Banyuwangi". Jakarta: PT Buanatama Dimensi Consultants, 2013.
- [10] Bappeda, "Pengembangan Database Potensi Kerjasama dan Penyusunan Materi Promosi Investasi", *Laporan Akhir*. Banyuwangi: Bappeda, 2013.
- [11] Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka, Banyuwangi: BPS, 2002.
- [12] Mitra Bayu "Pembangunan Terintegratif Dalam Mewujudkan Kota Pariwisata bertaraf Internasional", *JurnalJKKMP*, Vol. 2, No. 2, September 2014.
- [13] Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, "Pengembangan dan Penguatan Informasi Data Base", dalam Laporan Akhir Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Banyuwangi: Pemkab, 2013.
- [14] Anonim, Mantan Bupati Banyuwangi Kasus Pembebasan Lahan Lapter dalam *Berita Metro*, Banyuwangi, 3 Juli 2012.
- [15] Christian Andika. *Segitiga Berlian: Eksotika Keindahan Bumi Blambangan*. Banyuwangi: Majalah Khusus Banyuwangi Ethno Carnival, 2012.
- [16] Ainur Rofiq, Banyuwangi, 10-2-2016.
- [17] Dariharto, Banyuwangi, 8-1-2016.
- [18] Dikanil, Banyuwangi, 7-12-2015.